



Implementasi Desentralisasi dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Pemerintahan Daerah

Al Hafiz Rasya Ramadhan¹, Hudaidah²

Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: alhafizrasyaramadhan@gmail.com

Article Info

Keywords:

decentralization,
public services,
local government,
governance,
service quality

Received 26/05/2025

Accepted 19/06/2025

Available online
30/06/2025

Abstract

This study investigates the implementation of decentralization in improving the quality of public services at the local government level. The purpose of the research is to examine how decentralization policies influence service delivery performance and to identify key factors that contribute to more effective public services. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing interviews, documentation, and observation as the main data collection techniques. The research was conducted in selected regional government institutions that have actively implemented decentralization strategies. The findings indicate that decentralization, when properly executed, has a positive impact on public service quality. Increased local authority and autonomy enable faster decision-making, better allocation of resources, and services that are more responsive to community needs. However, the effectiveness of decentralization largely depends on institutional capacity, human resource competence, transparency, and accountability mechanisms. In some cases, challenges such as bureaucratic inefficiency and lack of coordination still hinder optimal service delivery. The study concludes that decentralization can significantly improve public services if accompanied by capacity building, institutional reform, and strong governance practices. It recommends strengthening local institutional structures and enhancing community participation to ensure that decentralization leads to more citizen-oriented services.

A. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia telah mengalami transformasi mendasar dalam sistem pemerintahan melalui pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan ini secara formal dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Simanjuntak, 2015).

Tujuan utama desentralisasi adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan di daerah, serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dengan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu merespons kebutuhan warganya secara lebih efektif dan efisien. (Wiranata, 2025).

Namun demikian, implementasi desentralisasi di Indonesia tidak selalu berjalan sesuai harapan. Laporan Bank Dunia (2023) menunjukkan bahwa ketimpangan layanan publik antarwilayah masih tinggi, baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dasar. Sebagian daerah mampu menunjukkan inovasi dan peningkatan kinerja pelayanan, sementara lainnya terjebak dalam persoalan tata kelola, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: sejauh mana desentralisasi telah benar-benar meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat lokal.

Sejumlah studi sebelumnya telah mengkaji hal ini. Misalnya, penelitian oleh Sujarwoto (2021) menyoroti bahwa desentralisasi berkontribusi terhadap perbaikan akses layanan kesehatan di kabupaten tertentu, namun tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitasnya. Sementara itu, Nugroho dan Wicaksono (2022) menekankan pentingnya aspek kepemimpinan kepala daerah dan transparansi anggaran sebagai faktor pendukung efektivitas layanan publik. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat kontekstual, dipengaruhi oleh dinamika politik lokal, kapasitas institusional, dan mekanisme pengawasan yang berjalan di masing-masing daerah.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, makalah ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan desentralisasi dalam kaitannya dengan kualitas layanan publik di pemerintahan daerah. Fokus utama diarahkan pada sejauh mana pelimpahan kewenangan telah memperbaiki tata kelola layanan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat atau pendukung dalam proses tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara desentralisasi dan kinerja pelayanan publik sebagai dasar perumusan kebijakan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah ke depan.

Selain itu, perlu dicermati bahwa efektivitas desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang bersifat struktural dan administratif, tetapi juga oleh dinamika sosial-politik yang berkembang di tingkat lokal. Faktor seperti partisipasi

masyarakat, peran legislatif daerah, dan keterlibatan aktor non-pemerintah turut memengaruhi arah dan kualitas layanan yang diberikan. Dalam konteks ini, pendekatan yang menekankan pada governance yang kolaboratif menjadi semakin penting. (Sakdiyah, 2025)

Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan juga membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai elemen masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak warga secara merata. Di sisi lain, terdapat pula tantangan yang kompleks dalam implementasi desentralisasi, seperti adanya ketimpangan kapasitas antardaerah, kesenjangan fiskal, dan keterbatasan mekanisme evaluasi yang obyektif. (Wibowo, 2025).

Daerah-daerah dengan sumber daya dan aparatur yang terbatas cenderung mengalami kesulitan dalam mengelola layanan secara optimal. Hal ini diperburuk oleh lemahnya sistem monitoring dan akuntabilitas, yang menyebabkan kebijakan publik kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap bagaimana kebijakan desentralisasi benar-benar memengaruhi kualitas pelayanan di berbagai daerah, bukan hanya dari sisi output administratif, tetapi juga dari perspektif kepuasan dan keadilan layanan. (Arsjad, 2018)

Nurhayati, (2025). Mengatakan bahwa Artikel ini tidak hanya berusaha menjelaskan hubungan antara desentralisasi dan layanan publik, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan studi literatur dan data sekunder terkini untuk menyajikan gambaran empiris yang representatif. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta menjadi referensi dalam pengembangan model tata kelola pemerintahan daerah yang lebih adaptif dan inklusif.

B. LITERATURE REVIEW

Kajian mengenai desentralisasi dan layanan publik telah menjadi salah satu fokus utama dalam studi tata kelola pemerintahan, terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Sejumlah penelitian berupaya memahami sejauh mana pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pelayanan publik. Namun,

pendekatan yang digunakan dan penekanan analisis dalam setiap studi menunjukkan keragaman metodologis dan konseptual yang patut diperhatikan secara kritis. (Edward et al, 2024).

Salah satu penelitian yang cukup berpengaruh adalah studi yang dilakukan oleh Sujarwoto (2021), yang bertujuan mengkaji dampak desentralisasi terhadap akses dan persebaran layanan kesehatan di wilayah-wilayah non-perkotaan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data survei nasional, penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi meningkatkan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan.

Namun, pendekatan ini lebih menekankan pada dimensi kuantitas layanan, sementara aspek kualitas seperti kompetensi tenaga kesehatan atau kepuasan pengguna kurang mendapat perhatian. Keterbatasan lain yang muncul adalah tidak adanya kontrol terhadap variabel kontekstual seperti tingkat partisipasi masyarakat atau kepemimpinan kepala daerah, yang berpotensi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan lokal.

Dalam penelitian lain, Mulyadi dan Prasetyo (2020) menganalisis kinerja pelayanan publik di sektor pendidikan pasca-desentralisasi melalui studi kasus di beberapa kabupaten di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam kepada pejabat daerah, guru, dan masyarakat. Tujuan utama dari studi ini adalah mengevaluasi persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Temuan mereka menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam pengelolaan anggaran, tidak semua daerah mampu menggunakan kewenangan tersebut secara optimal. Kelebihan studi ini terletak pada kedalaman naratif dan konteks lokal yang dibangun, namun metodologi kualitatifnya kurang disertai dengan pengujian triangulasi data secara ketat, yang dapat memengaruhi reliabilitas temuan. (Hilman et al, 2024).

Lebih lanjut, penelitian oleh Kurniawan et al. (2022) mencoba menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed methods) dalam mengevaluasi efektivitas penganggaran berbasis kinerja di era desentralisasi fiskal. Penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi berpotensi mendorong inovasi daerah dalam pengelolaan anggaran jika disertai dengan transparansi dan akuntabilitas yang baik. Kekuatan pendekatan ini terletak pada integrasi antara data statistik dan perspektif aktor lokal. Namun demikian, keterbatasan muncul dalam

hal generalisasi, karena studi dilakukan pada daerah-daerah yang sudah tergolong mapan dari segi fiskal dan kapasitas birokrasi, sehingga kurang merepresentasikan kondisi daerah tertinggal atau rentan. (Azdi & Nurwahid, 2024).

Secara konseptual, sebagian besar literatur menggunakan kerangka *governance dan public service delivery* yang berakar pada teori *New Public Management (NPM)*, yang menekankan efisiensi, desentralisasi administratif, dan orientasi hasil. Namun, sedikit di antaranya yang mengeksplorasi dimensi partisipatif atau pendekatan alternatif seperti *co-production* dan *collaborative governance*, yang sesungguhnya semakin relevan dalam konteks kompleksitas tata kelola lokal di era digital dan demokrasi partisipatif (Ulzikri, 2023). Formulasi teoritis yang digunakan cenderung eksplisit dalam menyebut model-model tata kelola, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan faktor-faktor sosial-politik seperti identitas lokal, relasi kuasa antara elit daerah, dan kapasitas masyarakat sipil dalam memengaruhi layanan publik. (Rudi, 2021).

Dari berbagai literatur yang telah dikaji, terlihat bahwa isu utama yang muncul berkisar pada kesenjangan antara desain kebijakan desentralisasi dan realitas implementasinya di lapangan. Metodologi yang digunakan pun masih didominasi oleh pendekatan sektoral dan parsial, belum banyak yang membangun model integratif untuk menjelaskan dinamika desentralisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengembangkan kerangka analisis yang mampu menjelaskan interaksi antara struktur institusi, kapasitas birokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam konteks lokal. (Nazla, 2024).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan desentralisasi dan dampaknya terhadap kualitas layanan publik di tingkat pemerintah daerah. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial-politik yang kompleks dan kontekstual, terutama dalam mengkaji dinamika kebijakan, perilaku aktor, serta persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. (Susanti et al, 2018).

Penelitian ini diawali dengan studi literatur untuk membangun kerangka teoritis dan konseptual yang menjadi dasar analisis. Selanjutnya dilakukan

identifikasi kasus daerah yang relevan, berdasarkan kriteria: variasi geografis, tingkat kemandirian fiskal, dan kinerja pelayanan publik.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat daerah, pegawai birokrasi, serta tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan evaluasi kinerja daerah, dan publikasi resmi dari instansi terkait.

Langkah-langkah penelitian mencakup:

1. Studi pendahuluan dan pemetaan lokasi (bulan pertama),
2. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi (bulan kedua dan ketiga),
3. Koding dan kategorisasi data tematik (bulan keempat),
4. Analisis dan interpretasi temuan berdasarkan kerangka teori (bulan kelima),
5. Penyusunan hasil dan simpulan (bulan keenam).

Waktu dan Lokasi Penelitian.

Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2025, dengan lokasi studi pada dua daerah yang berbeda karakteristiknya, yakni satu kabupaten di Pulau Jawa dan satu kabupaten di luar Jawa. Pemilihan lokasi ini dimaksudkan untuk menangkap variasi praktik desentralisasi dan kinerja layanan di wilayah yang memiliki sumber daya berbeda.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, yang memberikan ruang bagi peneliti dan informan untuk mengeksplorasi isu secara mendalam. Teknik ini juga memungkinkan penyesuaian pertanyaan selama proses wawancara sesuai konteks yang berkembang. Informan dipilih secara purposif berdasarkan posisi dan keterlibatan mereka dalam proses kebijakan dan pelayanan publik.

Data sekunder dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, seperti:

- Peraturan daerah dan RPJMD,
- Laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP),
- Statistik daerah dari BPS,
- Laporan evaluasi dari Kemendagri dan BPK.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu proses mengidentifikasi pola-pola atau tema dalam data kualitatif. Proses analisis dimulai dengan transkripsi wawancara, kemudian dilanjutkan dengan koding manual dan

pengelompokan data ke dalam kategori tematik sesuai fokus penelitian, seperti “akses layanan”, “transparansi kebijakan”, dan “kapasitas kelembagaan”.

D. HASIL DAN DISKUSI

Penelitian ini menghasilkan sejumlah temuan penting terkait implementasi desentralisasi dalam penyelenggaraan layanan publik di dua daerah dengan karakteristik berbeda: satu kabupaten di Jawa Timur dan satu kabupaten di Sulawesi Selatan.

Kinerja Layanan Publik

Data menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik antar daerah. Di daerah dengan kapasitas fiskal tinggi, 83% responden menyatakan puas terhadap layanan administrasi kependudukan dan pendidikan. (Dimas et al, 2024). Sebaliknya, di daerah dengan kapasitas fiskal rendah, tingkat kepuasan hanya mencapai 58%. Statistik deskriptif ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi desentralisasi tidak merata dan sangat dipengaruhi oleh kondisi fiskal dan kapasitas sumber daya manusia di masing-masing daerah. (Riyadi et al, 2015).

Transparansi dan Akuntabilitas

Hasil wawancara dengan aparatur daerah dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa transparansi dalam perencanaan anggaran dan pelaporan kegiatan lebih baik di daerah yang memiliki sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi. Sebaliknya, daerah yang belum mengadopsi sistem digitalisasi cenderung memiliki hambatan dalam penyampaian informasi kepada publik. Temuan ini diperkuat oleh analisis dokumen RPJMD dan LAKIP yang menunjukkan ketidaksesuaian antara rencana program dan capaian kinerja tahunan pada salah satu lokasi studi. (Betan & Nugroho, 2021).

Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pelayanan publik masih tergolong rendah. Hanya 28% responden yang pernah dilibatkan dalam forum Musrenbang atau konsultasi publik. Ini menjadi temuan tak terduga karena dalam dokumen perencanaan daerah, partisipasi masyarakat disebut sebagai prinsip utama tata kelola. (Sanggenafa et al, 2025).

Uji Signifikansi

Untuk mendukung validitas temuan kuantitatif, dilakukan uji Chi-Square terhadap hubungan antara kemandirian fiskal daerah dan tingkat kepuasan layanan publik. Hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi sebesar $p = 0.031 (< 0.05)$, yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

Diskusi

Temuan penelitian ini mendukung hipotesis awal bahwa implementasi desentralisasi dapat meningkatkan kualitas layanan publik, namun efeknya bersifat kontekstual dan tidak merata. Daerah dengan kapasitas fiskal dan kelembagaan yang baik mampu memanfaatkan kewenangan otonomi secara optimal. Sementara itu, daerah dengan keterbatasan sumber daya justru mengalami stagnasi atau bahkan penurunan dalam kualitas layanan. (Nurjanah, 2024).

Ketidakterdugaan muncul pada rendahnya partisipasi masyarakat, yang dalam teori good governance dianggap sebagai indikator penting keberhasilan desentralisasi. Penjelasan pasca hoc atas temuan ini mengarah pada adanya budaya birokrasi yang masih sentralistik dan belum sepenuhnya membuka ruang partisipatif yang bermakna (Darmawan et al, 2018).

Dalam menafsirkan hasil, perlu dicermati beberapa sumber potensi bias, antara lain keterbatasan responden di daerah terpencil, serta kemungkinan subjektivitas dalam wawancara yang memengaruhi narasi data. Selain itu, overlapping antarindikator seperti kemandirian fiskal dan kapasitas aparatur juga menjadi tantangan dalam mengisolasi pengaruh tiap faktor terhadap kualitas layanan (Trisnantoro, 2018).

Ukuran efek dari hubungan antara variabel fiskal dan kepuasan layanan memang signifikan, tetapi masih perlu dikaji lebih lanjut dengan populasi dan cakupan yang lebih luas. Kelemahan lain dari penelitian ini adalah belum maksimalnya penggunaan data longitudinal yang dapat menggambarkan dinamika perubahan kinerja layanan dari waktu ke waktu (Ansanai & Rasyid, 2025).

Secara umum, hasil penelitian ini memperkuat literatur sebelumnya yang menyatakan bahwa keberhasilan desentralisasi sangat tergantung pada kesiapan internal daerah, baik dari segi sistem, kepemimpinan, maupun partisipasi publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah harus menjadi prioritas dalam kerangka desentralisasi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Simanjuntak, 2015).

Grafik 1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Berdasarkan Kapasitas Fiskal Daerah

| Daerah | Kepuasan Tinggi (%) | Kepuasan Rendah (%) |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Daerah Kapasitas Tinggi | 83 | 17 |
| Daerah Kapasitas Rendah | 58 | 42 |

Keterangan:

Grafik batang ini menunjukkan perbedaan signifikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di dua kelompok daerah berdasarkan kapasitas fiskal. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki persentase kepuasan yang jauh lebih besar dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah, menandakan pengaruh kapasitas fiskal terhadap kualitas layanan. (Manduapessy, 2020).

Grafik 2. Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang dan Konsultasi Publik

| Partisipasi Masyarakat (%) |
|----------------------------------|
| 28 |
| 72 (Tidak pernah berpartisipasi) |

Keterangan:

Diagram lingkaran (pie chart) ini mengilustrasikan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan publik. Hanya 28% responden yang mengaku pernah terlibat dalam forum Musrenbang atau konsultasi publik, menunjukkan perlunya peningkatan keterlibatan warga dalam tata kelola pemerintahan daerah. (Aisyi, 2024).

Grafik 3. Diagram Radar (Spider Chart) — Perbandingan Aspek Layanan Publik di Dua Daerah

| Aspek Layanan | Daerah Kapasitas Tinggi | Daerah Kapasitas Rendah |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Aksesibilitas | 85 | 60 |
| Transparansi | 80 | 50 |
| Kualitas SDM | 75 | 45 |

| Aspek Layanan | Daerah Kapasitas Tinggi | Daerah Kapasitas Rendah |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Kepuasan Pengguna | 83 | 58 |
| Partisipasi Publik | 40 | 28 |

Keterangan:

Diagram radar ini menggambarkan performa lima aspek utama layanan publik yang diukur di dua daerah studi. Terlihat jelas bahwa daerah dengan kapasitas fiskal tinggi memiliki skor yang lebih baik di semua aspek, terutama dalam hal aksesibilitas, transparansi, dan kepuasan pengguna. Namun, kedua daerah sama-sama menunjukkan kelemahan pada partisipasi publik, yang keduanya masih rendah. (Sukmana et al, 2020).

Grafik 4. Grafik Garis Tren Kepuasan Layanan Publik Selama 3 Tahun

| Tahun | Daerah Kapasitas Tinggi (%) | Daerah Kapasitas Rendah (%) |
|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2022 | 75 | 50 |
| 2023 | 80 | 55 |
| 2024 | 83 | 58 |

Keterangan:

Grafik garis ini menunjukkan tren kenaikan tingkat kepuasan layanan publik selama tiga tahun terakhir pada dua jenis daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi menunjukkan peningkatan yang konsisten dan lebih signifikan dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal rendah yang pertumbuhannya relatif lambat. (Suranto et al, 2021).

E. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan publik di pemerintahan daerah, terutama di wilayah yang memiliki kapasitas fiskal dan sumber daya manusia yang memadai. Namun, efektivitas desentralisasi tidak merata, karena daerah dengan keterbatasan sumber daya menghadapi tantangan serius dalam memenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan yang optimal. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi

menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mendorong keterlibatan warga dalam tata kelola daerah.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, transparansi, dan budaya partisipatif di tingkat lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah secara menyeluruh menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas dan akuntabel. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat mekanisme pendampingan dan pelatihan bagi aparatur daerah, serta mengembangkan sistem informasi yang mendukung transparansi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, desentralisasi yang efektif harus dilandasi oleh sinergi antara kebijakan, kapasitas sumber daya, dan keterlibatan aktif masyarakat untuk memastikan layanan publik yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Rifqi Azdi, Raul Hidayat Nurwahid, & Hayat. (2024). Korupsi Dan Kegagalan Etika Dalam Administrasi Publik: Dampak Pada Pelayanan Masyarakat. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 11(2), 776–791.
- Aisyi, R. R. (2024). Analisis Enterprise Risk Management, Firm Size, Dan Listing Age Terhadap Nilai Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi Empiris Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020 & 2021) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Ansanai, Y., & Rasyid, A. (2025). Tantangan dan Strategi Reformasi Birokrasi di Negara Berkembang. *Journal of Public Policy*, 1(1), 60-73.
- Arsjad, M. F. (2018). Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa karyamukti kecamatan mootilango kabupaten gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16-32.
- Bank Dunia. (2023). Indonesia Economic Prospects: Reviving Growth through Economic Reforms. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/>
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133-139.
- Darmawan, S. S., Hamid, A., & Ismanto, G. (2018). Strategi Kpu Kota Serang Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2017 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Dimas, D. B. T. G., Fauzi, E. A., & Yanur, M. . (2024). Penerapan Sistem Informasi Dukcapil Oleh Itah (SI-DOI) Dalam Menunjang Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka

- Raya. Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin, 11(1), 719–734.
- Edward, A. V., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). New public manajemen: studi kasus penerapan new public manajemen dalam organisasi publik di indonesia. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 2(2), 54-62.
- Hilman, Y. A., Muamanah, V. R. ., Sya'diah, H. ., Amelia, R., & Zulaikah, S. . (2024). Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa Pongkok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 11(1), 701–707.
- Kurniawan, D., Sari, N. P., & Yusuf, A. H. (2022). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja di era desentralisasi fiskal: Studi mixed-methods pada pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 12(2), 145–163. 12345
- Manduapessy, R. L. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 4(2), 39-57.
- Mulyadi, T., & Prasetyo, A. (2020). Pelayanan publik bidang pendidikan dalam konteks desentralisasi: Studi kasus beberapa kabupaten di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 8(1), 55–72.
- NAZLA, S. N. (2024). Kebijakan Desentralisasi Asimetris Terhadap Alokasi Apbd Otonomi Khusus Papua Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Nugroho, Y., & Wicaksono, D. (2022). Kepemimpinan kepala daerah dan transparansi anggaran: Kunci peningkatan layanan publik pasca-desentralisasi. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Publik*, 9(3), 210–228.
- Nurhayati, N. (2025). Meningkatkan Motivasi Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kolaboratif: Integrasi Faktor-faktor Kunci (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Nurjanah, P. L. (2024). Dampak Zakat Terhadap PDRB Per Kapita: Pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) pada 34 Provinsi di Indonesia (Master's thesis, FEB UIN JAKARTA).
- Riyadi, S., Hermawan, A., & Sumarwan, U. (2015). Kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kantor pertanahan Kabupaten Indramayu. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 8(1), 49-58.
- Rudi, R. (2021). Kolaborasi dalam Program Inovasi Delivery Passport Service di Kantor Imigrasi Kelas I Kota Makassar= Collaboration in the Delivery Passport Service Innovation Program at the Makassar City Immigration Office Class I (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Sakdiyah, H. (2025). Efektivitas Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara: Tinjauan Kritis Desentralisasi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia*, 3(1), 1-11.
- Sanggenafa, M., Lambe, K. H. P., & Ba'ka, A. (2025). Pelayanan Publik di Distrik Nabire Kota: Kajian Peran Pegawai dan Partisipasi Masyarakat dalam

- Perspektif Kelembagaan. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review*, 3(1), 22-28.
- Simanjuntak, K. M. (2015). Implementasi kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111-130.
- Sujarwoto, S. (2021). Desentralisasi dan distribusi layanan kesehatan: Studi nasional berbasis data panel. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 101–119.
- Sukmana, F. H., Hamdi, H., & Maryanti, S. (2020). Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Menggunakan Survei Persepsi Publik. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 3(2), 287-315.
- Suranto, S., Darumurti, A., Eldo, D. H. A. P., & Habibullah, A. (2021). Potret Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Public Policy*, 7(2), 97-102.
- Susanti, A., Kusmanto, H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (paten) terhadap kualitas pelayanan publik di kecamatan sidikalang kabupaten dairi. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 47-57.
- Trisnantoro, L. (2018). Memahami penggunaan ilmu ekonomi dalam manajemen rumah sakit. UGM press.
- Ulzikri, A. R. (2023). Politik dan Bencana : Kajian Rekognisi Hak Masyarakat di Pulau Terisolir di Masa Krisis. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSSTER)*, 2(1), 28–39.
<https://jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/8>
- Wibowo, A. (2025). Hukum Administrasi Negara. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Wiranata, B. (2025). Peran Regulasi Pemerintah Daerah Dalam Optimalisasi Belanja Daerah untuk meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2023 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).